

# PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Wan Humairah Ramadita  
NPP. 29.0334

*Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: wanhumairaah04@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by the Covid-19 pandemic in Indonesia, which requires the government to issue policies related to community restrictions in carrying out activities outside the home which have a huge impact on various sectors, especially the economic sector. To overcome this, the Ministry of Social Affairs issued a Cash Social Assistance Program (BST) for people affected by the Covid-19 pandemic. However, in reality, the distribution of Cash Social Assistance in Batam City still has various problems, one of which is the inaccuracy of targets in the distribution of Cash Social Assistance (BST). **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Social Service in distributing Cash Social Assistance carried out by the Social Service to people affected by Covid-19 in Batam City as well as the obstacles and efforts to deal with these problems. **Method:** The research method used is a qualitative research method using the role theory of Soerjono Soekanto and with technical data collection through interview, observation and documentation techniques. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The technique of analyzing the data used in this research is by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the research conducted, it is known that the obstacles that occur in the distribution of Cash Social Assistance are because they are still using old data or data that has not been updated. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Social Service in distributing Cash Social Assistance (BST) to communities affected by COVID-19 has been carried out well, but there are still obstacles such as recipient data that is still based on old data so that there are still beneficiaries who do not disburse assistance. the aid fund is because the recipient has died or has moved as well as the sudden delivery of information

**Keywords:** Social Service; Cash Social Assistance, Covid-19

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini di latar belakang oleh adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan masyarakat dalam melakukan aktifitas diluar rumah yang sangat berdampak pada berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Sosial mengeluarkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Namun, dalam kenyataannya, penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Batam masih terdapat berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai

(BST). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Batam serta kendala dan upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Peran dari Soerjono Soekanto dan dengan teknis pengumpulan data melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kendala yang terjadi dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai dikarenakan masih menggunakan data yang lama atau data yang belum di perbaharui. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak covid-19 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat kendala seperti data penerima yang masih berpatokan pada data lama sehingga masih terdapat penerima Bantuan yang tidak mencairkan dana bantuannya dikarenakan penerima tersebut sudah meninggal maupun sudah pindah serta penyampaian informasi yang mendadak.

**Kata kunci:** Dinas Sosial; Bantuan Sosial Tunai, Covid-19

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada Desember 2019, terjadi sebuah kasus pneumonia yang belum diketahui penyebabnya yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus yang belum diketahui penyebabnya tersebut sebagai virus jenis baru yaitu coronavirus ( novel coronavirus, 2019-nCoV ). Virus ini dapat menyerang manusia maupun hewan dan biasanya menyerang saluran pernapasan dengan tanda-tanda awal seperti influenza hingga menimbulkan gangguan pernapasan akut berat (SARS). Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat cepat dan signifikan di China maupun di Negara lain. Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO memutuskan untuk menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat. Dikarenakan penyebaran kasus ini yang semakin hari semakin meningkat maka WHO menetapkan bahwa virus corona ini sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Penyebaran serta peningkatan jumlah kasus Covid-19 ini terjadi dalam rentang waktu yang singkat dan sangat cepat hingga telah menyebar ke antar Negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah mengkonfirmasi kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat hingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan lajunya angka peningkatan kasus Covid-19 ini. Salah satu kebijakan yang di berlakukan oleh pemerintah adalah kebijakan terkait pembatasan masyarakat dalam melakukan aktifitas diluar rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka sangat berdampak pada berbagai sektor terutama sektor ekonomi. Dampak dari sektor ekonomi tersebut salah satunya adalah banyak dari masyarakat yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berskala besar sehingga meningkatkan pengangguran.

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang di alami oleh masyarakat terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020. Dimana pada tahun 2019 angka PHK hanya sejumlah 49 ribu pekerja namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga berjumlah 3,6 juta pekerja. Selain itu, banyaknya masyarakat yang hanya diperbolehkan untuk bekerja dari rumah juga berdampak kepada masyarakat lainnya yang memiliki pekerjaan seperti pemilik rumah makan ataupun ojek online yang

kekurangan pelanggan disebabkan masyarakat memilih untuk memasak makanan sendiri dibandingkan dengan memesan maupun makan makanan di luar. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Selain pada sektor ekonomi, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada sektor pariwisata seperti hotel, restaurant maupun pengusaha retail. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini membuat wisatawan yang datang menjadi sangat berkurang dan bahkan bisa dibilang tidak ada dikarenakan akses masuk ke dalam negeri maupun akses untuk keluar negeri sangat diperketat. Tidak adanya wisatawan yang datang berakibat pada rumah makan atau restaurant yang memiliki konsumen tetapnya adalah wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berakibat pada industri retail. Salah satu daerah yang terdampak pada industri retail ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. (Hanoatubun, 2020).

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerintah melalui Kementerian Sosial di pusat dan Dinas Sosial di daerah mengambil peran yang cukup strategis dalam rangka menekan akibat dari pandemi ini. Pemerintah telah menyiapkan berbagai inovasi program untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Program-program ini telah dirancang oleh pemerintah guna untuk memberikan jawaban bagi permasalahan dasar yang sedang dihadapi masyarakat yaitu terkait kesejahteraan sosial. Salah satu upaya dari pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah dengan adanya bantuan sosial. Bantuan sosial yang dimaksud salah satunya contohnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan yang rentan terkena dampak akibat dari wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan data yang ada, menurut independennews tanggal 20 Mei 2020, Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Batam tidak tepat sasaran. Terlihat dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa keluarga yang dianggap mampu, bahkan tergolong kaya justru terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai. Selain dari itu ada juga laporan yang mengatakan bahwa adanya ditemukan penerima Bantuan Sosial Tunai yang merupakan pasangan suami istri (alias double). (independennews.com).

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukn oleh Melati & Zulkarnain (2021) dengan judul *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 DI Kelurahan Pasir Pengraian*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitasan dari program bantuan social tunai di masa pandemi covid- 19 pada Kelurahan Pasir Pangaraian dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam program Bantuan Sosial Tunai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program BST disimpulkan belum efektif dilihat dari setiap indikatornya dan faktor penghambat keefektivan pelaksanaan program BST pada masa pandemic covid-19 di Kelurahan Pasir Pangaraian adalah faktor validasi data yang tidak valid dan faktor program yang dikeluarkan secara mendadak sehingga ketidak pahaman dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Penelitian kedua, dilakukan oleh Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak Dan Clarce Sarliana Maak (2021) dengan judul *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Sikumana*

– Kota Kupang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari Bantuan Sosial Tunai ini di Kelurahan Sikumana dan untuk mengetahui dampak lebih lanjut dari bantuan social tunai bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan Covid- 19 di Kelurahan Sikumana kepada masyarakat belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran masih belum memberikan pemahaman kepada masyarakat dimana masyarakat hanya diberi bantuan tapi belum diberikan sosialisasi tentang manfaat dari bantuan tersebut. Masyarakat juga belum memiliki kesadaran akan pelaporan diri sehingga masih banyak terjadi data ganda yang ada di Kelurahan Sikumana tersebut. penelitian terakhir, dilakukan oleh Aslihal Anwar (2020) dengan judul *Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dinas social dalam menyalurkan BPNT dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam menyalurkan BPNT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dinas Sosial Kabupaen Deli Serdang sebagai perpanjangan tangan dari Kemensos memiliki peranan besar, diantaranya sebagai koordinasi perencanaan anggaran, pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM, menyediakan pendamping, sosialisasi, perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT, evaluasi, pengadaan pengaduan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan program BPNT (2) Kendala Dinas Sosial dalam menyalurkan BPNT adalah tidak tepat sasaran, tidak masuk dalam basis data terpadu, data tidak ditemukan, administrasi kependudukan masyarakat kurang lengkap, dan terlambatnya bantuan yang dari Kemensos ke rekening KPM. Pada dasarnya tema yang peneliti ambil serupa dengan ketiga penelitian diatas, namun perbedaan metode dan juga lokasi menjadi faktor pembeda dari penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian serupa.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pada dasarnya tema yang peneliti ambil serupa dengan ketiga penelitian diatas, namun perbedaan metode dan juga lokasi menjadi faktor pembeda dari penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian serupa. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada peran Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

#### **1.5. Tujuan.**

Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dari Dinas Sosial Salam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menanggulangi kendala-kendala dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

## **II. METODE**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak covid-19 ini peneliti memakai metode pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, deskripsi dan lebih cenderung kepada kajian yang berfokus terkait kata-kata maupun tindakan terhadap subjek penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan purposive sampling sehingga peneliti dapat memilih informan yang memang secara langsung terlibat dalam objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu

Aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang terlibat, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang terlibat, dan masyarakat penerima KPM. Data dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, observasi dan dokumentasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau**

Pada masa pandemic covid-19 ini, banyak pihak yang dirugikan terutama masyarakat. Di Kota Batam sendiri, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan maupun mengalami penurunan pemasukan dikarenakan pandemic covid-19. Untuk membantu meringankan beban masyarakat, Dinas Sosial melaksanakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yaitu pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

Menurut Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dan apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diamanatkan sesuai dengan jabatannya, seseorang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan perannya. Dalam hal ini, Peran Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi pokok dalam menjalankan program-programnya. Terkait dengan Bantuan Sosial Tunai, bidang yang menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah bidang Penanganan Fakir Miskin. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data elektronik yang memuat segala informasi terkait perekonomian masyarakat, sosial dan juga demografi masyarakat dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. DTKS menjadi acuan atau pedoman bagi Kementerian Sosial maupun Lembaga lainnya yang sedang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam penetapan sasaran. Data Non DTKS sendiri merupakan data masyarakat yang belum terinput dalam DTKS, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria penerima Bantuan Sosial Tunai dapat memberikan fotocopy KTP maupun KK kepada RT/RW dan kemudian RT/RW memberikan data tersebut kepada kelurahan melalui aplikasi SIKnG yang dikirim oleh pengolah data kelurahan kepada Dinas Sosial dan selanjutnya diteruskan ke Pusdatin Kemensos RI. Dengan adanya usulan daerah ini diharapkan masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar dalam DTKS dan tidak mendapat jenis bantuan sosial apapun dari pemerintah seperti bantuan PKH dan BPNT dapat menerima Bantuan Sosial Tunai ini. Program Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu program yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dalam upaya untuk menanggulangi akibat dari pandemic covid-19 khususnya bagi masyarakat yang terdampak covid-19 seperti yang kehilangan pekerjaan maupun masyarakat yang mengalami penurunan pemasukan. Terkait hal itu, masih adanya masyarakat yang belum paham terkait maksud dan tujuan dikeluarkan kebijakan ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi akan program Bantuan Sosial Tunai ini kepada masyarakat sehingga masyarakat masih ada yang kebingungan terkait diadakannya program ini. Dapat terlihat bahwa dari Pihak Dinas Sosial sudah menganggap masyarakat mengerti akan alur penyaluran maupun maksud dan tujuan dikeluarkan Program Bantuan Sosial Tunai ini sedangkan dari masyarakat sendiri masih ditemukan ketidakpahaman akan program ini.

##### **b. Program**

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan Dinas Sosial di setiap Daerah. Program Bantuan Sosial Tunai

ini dikeluarkan dengan berlandaskan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pemberlakuan PPKM dan pembatasan dalam melakukan aktivitas sehingga pemasukan masyarakat menurun. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan berupa Program Bantuan Sosial Tunai ini agar dapat membantu masyarakat yang terdampak dari adanya pandemic covid-19. Yang penulis dapatkan adalah masyarakat sangat senang dan terbantu sekali dengan dikeluarkannya Program Bantuan Sosial Tunai, hal ini dikarenakan dengan adanya program ini masyarakat yang kehilangan pekerjaan dikarenakan adanya covid-19 dapat tetap mampu untuk menghidupi keluarganya sembari kembali mencari pekerjaan baru ditengah sulitnya lapangan pekerjaan pada saat masa pandemic covid-19. Selain itu masyarakat juga sangat berharap bahwa Program Bantuan Sosial ini dapat terus berlanjut, terutama bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam penerima Bantuan PKH maupun BPNT.

c. Sarana dan Prasarana

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan oleh Lembaga penyalur yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini adalah Kantor Pos. Segala hal terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam hal ini seperti kesiapan sarana dan prasarana seperti tempat pencairan dan sarana pendukung lainnya juga disediakan oleh Kantor POS selaku Lembaga penyalur dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Teknis pencairan Bantuan Sosial Tunai ini dengan masyarakat mendatangi kantor pos sesuai dengan kelurahan tempat ia tinggal dan langsung bisa mencairkan bantuan tersebut. Menurut Bapak Adi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sekupang yang telah diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa pencairan dana bantuan Sosial Tunai sendiri pada satu kali penyaluran per satu kelurahan dapat dibagi menjadi 3-4 hari dengan estimasi 2 kelurahan perharinya.

d. Ketersediaan Anggaran

Program Bantuan Sosial Tunai ini dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Maret tahun 2020 dengan nominal bantuan sejak bulan Maret hingga Agustus 2020 sebesar Rp 600.000-, perbulan dan sejak bulan September 2020 hingga Juni 2021, nominal bantuan berkurang menjadi sebesar Rp 300.000-, perbulannya. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Zulkaf Hambali selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin bahwa data penerima Bantuan Sosial Tunai ini berasal dari 2 kategori yaitu DTKS dan Non DTKS. Terkait hal tersebut Kota Batam sendiri mempunyai data Penerima Bantuan Sosial Tunai yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai yang dimulai dari Januari 2021 hingga Juni 2021 sebesar 15.000 hingga 16.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). realisasi penyaluran dari Bantuan Sosial Tunai di Kota Batam mulai dari bulan Januari 2021 hingga Juni 2021 seluruhnya berada diatas 80%. Seperti yang terlihat pada Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Tahap 10 bahwa jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai sebanyak 15.914 sedangkan untuk realisasinya sendiri atau yang menerima bantuan berjumlah sebanyak 15.594. Sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Tahap 10 pada bulan Januari ada sebanyak 320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai nya dengan rincian sebanyak 181 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal bayar. Gagal bayar disini dimaksudkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak ditemukan, dengan indikasi bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah meninggal atau nama serta alamat Keluarga Penerima tidak sesuai sehingga Keluarga Penerima Manfaat tidak dapat mengambil dana Bantuan Sosial Tunai-nya. Selain yang mengalami gagal bayar, terdapat sisa sebanyak 139 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mencairkan Dana Bantuan Sosial Tunai. Sisa disini dimaksudkan dengan Keluarga Penerima Manfaat yang tidak kunjung mencairkan Dana Bantuan Sosial Tunai hingga jatuh tempo. Bagi Dana Bantuan Sosial Tunai yang belum diambil baik karena gagal bayar maupun sisa, seluruh dana bantuan dikembalikan

kepada Kementerian Sosial RI. Dibandingkan dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap 14 dan 15 yaitu pada bulan Mei dan Juni 2021 terjadi peningkatan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 881 KPM sehingga jumlah KPM bertambah menjadi 16.795 KPM. Pada Tahap ini juga terjadi peningkatan terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami gagal bayar sebanyak 63 KPM sehingga KPM yang gagal bayar pada Tahap 14-15 sejumlah 244 KPM. Selain pada KPM yang mengalami gagal bayar, peningkatan juga terjadi pada KPM yang sisa atau yang tidak mencairkan Dana Bantuan Sosial Tunai hingga jatuh temponya. Jika pada Tahap 10 hanya berjumlah 139 KPM namun mengalami kenaikan sebanyak 1.685 KPM sehingga jumlah yang KPM yang tidak mencairkan dana hingga jatuh tempo atau sisa berjumlah sebanyak 1.824 KPM. Dari keterangan tersebut maka terdapat sisa anggaran sebanyak 1.240.800.000 yang kemudian dikembalikan lagi ke Negara dalam hal ini dikembalikan ke Kementerian Sosial RI. Sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Tahap 14-15 yaitu pada bulan Mei-Juni tercapai 87,69% dari target 100%.

e. Ketersediaan SDM

Sumber Daya Manusia merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah program. Terkait dengan Bantuan Sosial Tunai ini, Dinas Sosial menunjuk 12 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) disetiap kecamatan untuk mempermudah dalam menginput data masyarakat. Tidak hanya menunjukan seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) disetiap kecamatan namun juga menunjuk pendata yang berjumlah 64 orang yang berada di setiap kelurahan. Selain itu juga Dinas Sosial berkoordinasi dengan RT/RW serta kelurahan terkait penginputan data maupun penginformasian terkait pencairan dana Bantuan Sosial Tunai. dapat terlihat bahwa Sumber Daya Manusia yang mendukung terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini, mulai dari Dinas Sosial, Pihak Kecamatan dan Kelurahan, TKSK dan Pendata serta para RT/RW dirasa sudah cukup efektif apalagi ditambah dengan koordinasi yang baik antar Lembaga terkait sehingga dapat mensukseskan penyaluran Dana Bantuan Sosial ini.

### **3.2. Kendala-kendala dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau**

Kendala yang biasa terjadi dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai adalah data penerima Bantuan Sosial Tunai (KPM) yang dikeluarkan oleh Kemensos RI merupakan data lama sehingga Keluarga Penerima Manfaat tersebut bisa saja sudah meninggal maupun pindah akan tetapi tidak melapor kepada lurah setempat atau tidak mengubah alamat tinggal sehingga dana tersebut tidak dapat dicairkan. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan di setiap penyaluran Bantuan Sosial Tunai. dapat terlihat bahwa kendala-kendala yang paling sering terjadi dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial ini adalah data nama penerima atau data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI merupakan data-data yang bersumber dari data lama yaitu data DTKS. Sehingga bisa saja dalam kenyataannya di lapangan, nama-nama tersebut sudah pindah alamat atau pindah kota maupun provinsi namun tidak melapor ke RT/RW maupun lurah setempat sehingga keberadaan KPM tersebut tidak bisa dicari. Selain karena kemungkinan KPM sudah pindah, terdapat kemungkinan lain yaitu KPM sudah meninggal. Dikarenakan pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai ini tidak dapat diwakilkan dalam pengambilannya sehingga untuk pencairan Dana yang terkendala terkait data penerima yang sudah pindah maupun meninggal akan dikembalikan lagi kepada Kementerian Sosial RI. Selain itu, yang menjadi kendala dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai ini adalah informasi terkait pencairan Dana Bantuan yang mendadak sehingga penyampaian informasi tersebut

menjadi terburu-buru sampai ke masyarakat sehingga masyarakat pun menjadi terburu-buru dalam menyiapkan hal-hal yang menjadi ketentuan dalam pencairan Dana Bantuan Sosial.

### **3.3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut adalah dengan cara memverifikasi dan memvalidasi ulang data Keluarga Penerima Manfaat yang memang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat yang tidak mencairkan Dana Bantuan dan kemudian ditelusuri lagi apakah nama KPM tersebut sudah meninggal ataupun sudah pindah sehingga dapat dilaporkan agar pada penyaluran setelahnya nama tersebut tidak lagi ada dan diganti dengan nama KPM yang memang berhak menerima. Terkait penyampaian informasi yang mendadak tentang pencairan Dana Bantuan Sosial sendiri telah dilakukan pengupayaan agar masyarakat tidak terkejut dan merasa terburu-terburu dalam menyiapkan keperluannya adalah dengan cara menyampaikan sesegera mungkin informasi yang telah di dapatkan tersebut kepada kelurahan dan kelurahan pun segera menyampaikan kepada RT/RW terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima serta memberitahukan atau menginformasikan jadwal dan tempat pengambilan Dana Bantuan Sosial Tunai tersebut.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini ternyata memberikan hasil yang berbeda apabila dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya. Melati & Zulkarnain (2021) dengan judul *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengraian* menyimpulkan jika efektivitas pelaksanaan program BST disimpulkan belum efektif dilihat dari setiap indikatornya dan faktor penghambat keefektifan pelaksanaan program BST pada masa pandemic covid-19 di Kelurahan Pasir Pangraian adalah faktor validasi data yang tidak valid dan faktor program yang dikeluarkan secara mendadak sehingga ketidak pahaman dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Penelitian kedua, dilakukan oleh Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak Dan Clarce Sarliana Maak (2021) dengan judul *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)* menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan Covid- 19 di Kelurahan Sikumana kepada masyarakat belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran masih belum memberikan pemahaman kepada masyarakat dimana masyarakat hanya diberi bantuan tapi belum diberikan sosialisasi tentang manfaat dari bantuan tersebut. Masyarakat juga belum memiliki kesadaran akan pelaporan diri sehingga masih banyak terjadi data ganda yang ada di Kelurahan Sikumana tersebut. penelitian terakhir, dilakukan oleh Aslihal Anwar (2020) dengan judul *Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang* penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dinas Sosial Kabupaen Deli Serdang sebagai perpanjangan tangan dari Kemensos memiliki peranan besar, diantaranya sebagai koordinasi perencanaan anggaran, pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM, menyediakan pendamping, sosialisasi, perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT, evaluasi, pengadaan pengaduan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan program BPNT (2) Kendala Dinas Sosial dalam menyalurkan BPNT adalah tidak tepat sasaran, tidak masuk dalam basis data terpadu, data tidak ditemukan, administrasi kependudukan masyarakat kurang lengkap, dan terlambatnya bantuan yang dari Kemensos ke rekening KPM. Sedangkan penelitian ini menunjukkan hasil sebaliknya dimana secara keseluruhan berdasarkan pada 5 indikator telah dijalankan dengan baik walaupun masih memerlukan beberapa perbaikan.



#### **IV. KESIMPULAN**

Peran Dinas Sosial Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Batam dengan mekanisme yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan indikator yang telah penulis bahas. Dimana dari 5 indikator tersebut, seluruhnya sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Sosial walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan diperkuat dengan adanya data alokasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dapat terlihat bahwa penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini setelah di akumulasikan mencapai 93,4% sehingga didasari dengan hal tersebut, penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Batam dapat dikatakan berhasil dan Dinas Sosial telah menjalankan perannya dengan baik.

Kendala yang biasa terjadi dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai adalah data penerima Bantuan Sosial Tunai (KPM) yang dikeluarkan oleh Kemensos RI merupakan data lama yang belum diperbaharui sehingga Data Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar namun tidak dapat mencairkan Dana Bantuan sosial Tunai tersebut bisa saja sudah meninggal maupun pindah akan tetapi tidak melapor kepada lurah setempat atau tidak mengubah alamat tinggal sehingga dana tersebut tidak dapat dicairkan. Selain itu, informasi yang disampaikan secara mendadak juga menjadi suatu kendala yang terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menghadapi kendala ini adalah dengan cara mengecek atau memverifikasi ulang data yang tidak mencairkan Dana Bantuan Sosial Tunai tersebut dan mencari tahu apakah data penerima tersebut sudah meninggal ataupun pindah sehingga tidak dapat mencairkan dana BST. Dan yang selanjutnya data tersebut akan disampaikan kepada pihak Kementerian melalui link usulan yang dibuka pada saat itu terkait perbaikan nama penerima Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan slot yang ada.

Dinas Sosial seharusnya lebih aktif dan sesering mungkin untuk mengingatkan rekan kerjanya untuk lebih sering mengecek apakah data penerima Bantuan Sosial Tunai ini sudah layak untuk menerima atau tidak. Selain itu juga agar tidak lagi terjadi adanya nama penerima yang terdaftar namun tidak mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai ini. Menginformasikan dan memberitahukan sesegera mungkin kepada pihak kelurahan maupun RT/RW terkait segala informasi yang berhubungan dengan penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai sehingga informasi tersebut tidak disampaikan secara terburu-buru.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh aparatur sipil negara di Dinas Sosial Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh rekan yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. (2020) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dengan judul "Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)". Medan.
- Hanoatubun, S. (2020). "Dampak Covid – 19 Terhadap Prekonomian Indonesia." *Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1.
- Independennews. "Bantuan Sosial Tunai Sebesar Rp 14,547 Miliar Rupiah Di Kota Batam Kurang Tepat Sasaran, Siapa Yang Bertanggung Jawab." [independennews.com](http://independennews.com), 2020.

<https://independennews.com/bantuan-sosial-tunai-sebesar-rp-14547- miliar-rupiah-di-kota-batam-kurang-tepat-sasaran-siapa-yang- bertanggung-jawab/>. Diakses pada 27 Agustus 2021.

Maria, Novi, Clarce. (2021). “Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang).” *Journal of Economics, Oeconomicus*, Volume 5 No.2.

Melati, Zulkarnaini. (2021). “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian.” *Journal Publicuho*, Volume 4 No.1.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

